

**MANAJEMEN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP TAHUN
2009/2010**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Disusun oleh:

**KHOTIBUL UMAM
NIM. 06240025**

Pembimbing I:

**Drs.H. NGATIDJAN, MA.
NIP. 19480522 196712 1 003**

Pembimbing II:

**Hj. EARLY MAGHFIROH INNAYATI, M.Si.
NIP. 19741025 199803 2 001**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan pengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khotibul Umam
NIM : 06240025
Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)
Judul Skripsi : Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Tahun 2009/2010

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang.....

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 15 Juni 2011

Pembimbing I

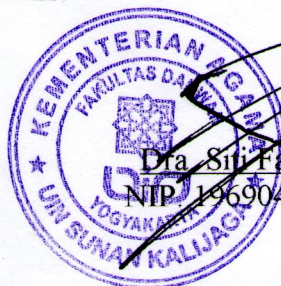
Pembimbing II

Drs.H.Ngatidjan, MA.
NIP. 19480522 196712 1 003

Hj.Early Maghfiroh Innayati, M.Si
NIP. 19741025 199803 2 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah



Dra. Siti Fatimah, M.Pd
NIP. 19690401 199403 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH**

Jl. Marsda Adisucipto Telepon. (0274) 515856 Fax (0274)
552230 Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/1066/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**MANAJEMEN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP TAHUN
2009/2010**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Khotibul Umam
Nomor Induk Mahasiswa : 06240025
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 14 Juli 2011
Nilai Munaqasyah : **A/B (Delapan Puluh Lima)**
dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

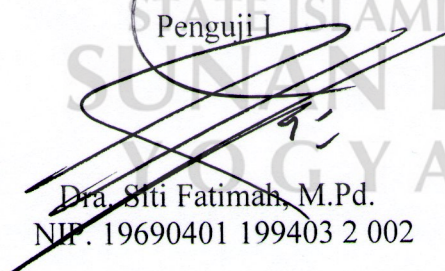
Pembimbing I


Drs.H.Ngatidjan, MA.
NIP. 19480522 196712 1 003

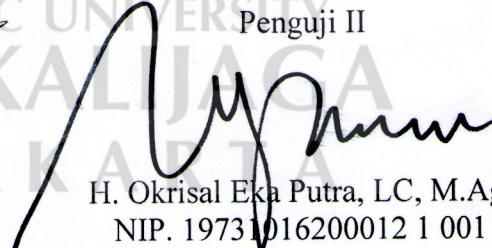
Pembimbing II


Hj.Early Maghfiroh Innayati, M.Si.
NIP. 19741025 199803 2 001

Penguji I


Dra. Siti Fatimah, M.Pd.
NIP. 19690401 199403 2 002

Penguji II


H. Okrisal Eka Putra, LC, M.Ag.
NIP. 19731016200012 1 001

Yogyakarta, 26 Juli 2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Dakwah
Dekan



Prof. Dr. H. M. Bahri Ghazali, MA
NIP. 19561123 198503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khotibul Umam
NIM : 06240025
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah

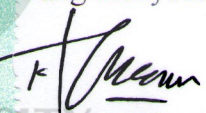
Menyetakan bahwa sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap tahun 2009/2010 adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 17 Juni 2011

Yang menyatakan,




Khotibul Umam
NIM.06240025

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya Persembahkan Kepada:

- ❖ Ayahandaku tersayang, Amirudin, S.Pd
- ❖ Ibundaku tercinta, Umi Khasanah yang sudah dulu meninggalkan saya
- ❖ Adiku tersayang, Akbar Aliyavi dan Mamihku, Nani yang selalu sabar dalam menjalani hidup
- ❖ Kaum kerabat dan saudara-saudaraku semua
- ❖ Serta temen-temenku semua yang tidak bisa saya sebut semuanya. Terima kasih atas masukan dan dorongan dalam menjalani kehidupan ini.
- ❖ Tak lupa pula Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Hari ini kita sama-sama belajar untuk menjadi yang terbaik dimata Allah SWT, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi untuk kepentingan orang banyak. Hidup ini sangat singkat dan hanya satu kali, manfaatkan lah tidak hanya untuk kepentingan sendiri”.¹

“Sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain”

(Penulis)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Ahmad Dahlan dalam film sang pencerah, sutradara Hanung Baramantyo.

KATA PENGANTAR



Tiada dapat kami haturkan selain puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, walau tidak dengan sesempurna mungkin. Shalawat dan salam kita haturkan pula kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat-sahabat beliau yang senantiasa setia dalam mengemban amanah memperjuangkan agama Allah di muka bumi ini.

Karya ini merupakan hasil pergulatan penulis melalui berbagai kegiatan observasi dan wawancara, di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Akhirnya, tidaklah dapat dipungkiri, skripsi ini dapat diselesaikan berkat partisipatif berbagai pihak yang cukup banyak dan luas. Maka dari itu, perkenankanlah kami menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada kontributor yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu dalam karya ini :

1. Dekan Fakultas Dakwah, Prof. Dr. H. M. Bahri Ghazali, MA.
2. Ibu Dra. Siti Fatimah, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. H. Ngatidjan, MA. dan Ibu Early Maghfiroh Innayati, M.Si. Selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Kepada para penguji, Dra. Siti Fatimah, M.Pd dan H. Okrisal Eka Putra, M.Ag yang sudah menguji, memberi arahan dan masukan.
5. Kepada Bapak Drs. H. Muhtadin, M.Si. selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap yang telah memberikan ijin penelitian saya.

6. Kepada Bapak Drs. H. Suratman, M.Si. selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap yang telah membimbing dan membantu dalam pelaksanaan penelitian saya.
7. Orang tua kami, ayahanda Amirudin, S.Pd yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa serta kasih sayangnya kepada saya dan Almarhumah ibunda Umi Khasanah semoga senantiasa tenang dalam alam kubur.
8. Kepada Ibunda Nani dan adikku tercinta, Akbar Aliyavi semoga selalu sukses dan berbakti kepada orang tua
9. Kepada bundaku tersayang, Lia Restiawati Hanggara yang selalu mendukung, membimbing, dan memotivasi saya dalam menjalani hidup
10. Kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Cilacap di Yogyakarta (HIMACITA) yang telah memberikan waktu luang kepada saya untuk bisa mengurus skripsi ini.
11. Serta kepada temen-temen semua yang tidak bisa saya sebut satu-satu.

Akhirul kalam, penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karenanya, saran yang konstruktif dan kritikan yang mencerdaskan, senantiasa penulis tunggu demi kesempurnaan dari penulisan ini. Semoga karya ini bermanfaat bagi siapapun yang mempergunakannya.

Yogyakarta, 17 Juni 2011

Penulis

Khotibul Umam

ABSTRAK

Umam, Khotibul. *Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Tahun 2009/2010.* 2011. Skripsi. Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap salah satu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses manajemen penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap periode 2009/2010.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Pendekatan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan manajemen. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Metode analisis data yaitu metode deskriptif yang diuji keabsahan datanya dengan metode triangulasi dan interpretasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap terkait dengan pembinaan, pelayanan dan perlindungan calon jamaah haji diterapkan dalam 4 fungsi manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Manajemen penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap meliputi: perencanaan program kerja yang mengacu kepada program tahun 2010-2014, pengorganisasian yang dilakukan oleh seksi penyelenggaraan haji dan umrah, penggerakan meliputi kegiatan Kementerian Agama Kabupaten Cilacap tahun 2009/2010 berupa kegiatan internal kantor dan eksternal kantor terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. pengawasan yang dilakukan guna mengetahui hasil dan mengadakan perbaikan kinerja terhadap pelayanan haji yakni dengan melakukan monitoring selama kegiatan terkait pelayanan, pembinaan, dan perlindungan calon jamaah haji. Deskripsi manajemen penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap meliputi: bimbingan berupa penyampaian informasi sosialisai pelaksanaan haji melalui KUA, KBIH dan BPS BPIH; pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap calon jamaah haji meliputi membenahi ketenaga kerjaan, melakukan pendaftaran secara simultan, memfasilitasi pengurusan dokumen, menyelenggarakan bimbingan masal 4 kali kepada calon jamaah haji 1431 H sebanyak 1110 orang dari daftar calon jamaah haji yang ada dan sampai pada proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji tahun 2010.

Kata Kunci: Manajemen, Penyelenggaraan Haji, Kementerian Agama Kabupaten Cilacap

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	4
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	10
G. Kerangka Teori	12
H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika Penelitian	29

BAB II: GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN

CILACAP	31
A. Sekilas Tentang Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah	
Kementerian Agama Kabupaten Cilacap	31
B. Tugas dan Fungsi Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah	33
C. Visi dan Misi	34
D. Wilayah Tugas	35
E. Program Kerja Tahun 2010	36

BAB III: MANAJEMEN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP TAHUN

2009/2010

A. Tinjauan Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor	
Kementerian Agama Kabupaten Cilacap	38
1. Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Kantor Kementrian	
Agama Kabupaten Cilacap	40
2. Sarana dan Prasarana	41
B. Manajemen Penyelenggara Ibadah Haji di Kementerian Agama	
Kabupaten Cilacap Tahun 2009/2010	42
1. Perencanaan (<i>Planing</i>) Haji	44
2. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>) Haji	48
3. Penggerakan (<i>Actuating</i>) Haji	54
4. Pengawasan (<i>Controlling</i>) Haji	87
C. Strategi dalam Peningkatan Manajemen	90

BAB IV: PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran-Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah penduduk dirinci dari sudut Agama	35
Tabel 2. Data Pegawai Kementrian Agama Kabupaten Cilacap	36
Tabel 3. Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap	101



DAFTAR SIGKATAN

SISKOHAT	: Sistem Komputerisasi Haji Terpadu
SDM	: Sumber Daya Manusia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
RI	: Republik Indonesia
KUA	: Kantor Urusan Agama
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
BAZDA	: Badan Amil Zakat Daerah
MA	: Madrasah Aliyah
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
Karu	: Ketua Regu
Karom	: Ketua Rombongan
BMN	: Barang Milik Negara
ATK	: Alat Tulis Kantor
Kab.	: Kabupaten
UU	: Undang-undang
PPIH	: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji
Kasi	: Kepala Seksi
BPS	: Bank Penerima Setoran
BPIH	: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
KBIH	: Kelompok Bimbingan Ibadah Haji
TPHD	: Tim Pemandu Haji Daerah
TKHD	: Tim Kesehatan Haji Daerah
KMA	: Keputusan Menteri Agama
SPPH	: Surat Pendaftaran Pergi Haji
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KK	: Kartu Keluarga
SPRI	: Surat Perjalanan Republik Indonesia
BKJH	: Buku Kesehatan Jamaah Haji

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENEGASAN JUDUL

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami skripsi yang berjudul : “**MANAJEMEN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP TAHUN 2009/2010**”, maka penulis memandang perlu untuk mempertegas istilah-istilah yang terdapat dalam judul, yaitu sebagai berikut.

1. Manajemen

Kata manajemen yang berasal dari bahasa Inggris *management*, diterjemahkan menjadi “pengelolaan” dalam bahasa Indonesia. M. Syafaat Habib berpendapat, bahwa manajemen adalah pengelolaan secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan.¹

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan berbagai usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.² Manajemen merupakan suatu proses dalam melakukan sesuatu, dikarenakan manajemen menunjukkan cara yang sistematis dalam melakukan sesuatu.

Manajemen dalam penelitian ini adalah manajemen yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Baik nantinya terkait dengan mulai

¹ M. Syafaat Habib, *Buku Pedoman Dakwah*, (Jakarta: Wijaya, 1982), hlm 194.

² Suad Husnah, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1989), hlm 2.

pendaftaran sampai berangkat haji. Dalam penelitian ini manajemen penyelenggaraan haji yang dimaksud adalah manajemen penyelenggaraan ibadah haji yang ditangani dan bertanggung jawab langsung dibawah Kementerian Agama Kabupaten Cilacap.

2. Penyelenggaran Ibadah haji

Penyelenggaraan ibadah haji adalah serangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jamaah Haji.³

Dalam penelitian ini pelayanan, pembinaan, dan perlindungan yang dimaksudkan adalah menyediakan layanan informasi haji, administrasi, kesehatan, transportasi, bimbingan manasik haji, dan keamanan calon jamaah haji selama perjalanan dari kabupaten/ kota menuju ke embarkasi (Solo), dan perjalanan pulang dari debarkasi solo sampai ke Cilacap. Calon jamaah haji dalam penelitian ini adalah bukan pelaksanaan haji khusus (plus), melainkan pelaksanaan haji reguler.

3. Ibadah Haji

Haji (Bahasa Arab: حج , *Haji*) adalah rukun (tiang agama) Islam yang kelima setelah syahadat, salat, zakat dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu (material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa amalan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai *musim*

³ undang-undang RI nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, pasal 1 ayat 2

haji.⁴ Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu.⁵

Pengertian haji menurut syara' adalah menuju Ka'bah untuk beribadah dengan melakukan beberapa perbuatan yaitu: ihrom, wukuf, thawaf, sa'i, dan lain-lainnya.⁶

Pengertian haji yang dijabarkan di atas sesuai dengan pengertian firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ
وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

“Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu Baitullah (Ka'bah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud”⁷

Adapun pengertian Ibadah haji dalam penelitian disini adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan cara pengelolaan secara sistematis agar bisa dikoordinir dengan baik sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Haji>, diakses pada tanggal 1 Maret 2011.

⁵ Ibadah haji dilakukan pada bulan Dzulhijjah, kalau ibadah yang dilakukan pada waktu kapan saja dinamakan umrah.

⁶ Departemen Agama RI, *Fiqih haji*, (Jakarta: Direktorat jenderal bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji proyek peningkatan layanan ibadah haji pusat, 2001), hlm 4.

⁷ Al-Baqarah (2) : 125.

4. Kementerian Agama Kabupaten Cilacap 2009/ 2010

Kementerian Agama Kabupaten Cilacap adalah lembaga pemerintahan yang berada dibawah kementerian Agama pusat. Lembaga ini adalah lembaga pemerintahan ditingkat Kabupaten. Salah satu urusan yang ditangani oleh lembaga tersebut adalah tentang ibadah haji.

Kementerian Agama Kabupaten Cilacap adalah termasuk lembaga yang tidak diotonomikan. Artinya Kementerian Agama Kabupaten Cilacap tidak memiliki hal otonom dalam mengatur dan mengelolanya. Kementerian Agama sebagai pelaksana dalam pelaksanaan program Kementerian Agama Pusat, melalui koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan dari penegasan istilah-istilah ditersebut, maka yang dimaksud judul penelitian “Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Tahun 2009/2010” yaitu suatu penelitian yang berupa mendeskripsikan proses pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Cilacap pada pelaksanaan haji tahun 2010 dengan menggunakan acuan laporan hasil pelaksanaan haji tahun 2010.

B. LATAR BELAKANG

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang *istita'ah* (mampu) untuk menunaikan perjalanan ke Baitullah. Kewajiban tersebut hanya diperintahkan sekali seumur hidup dan

selebihnya merupakan sunnah. Tetapi banyaknya yang menerangkan keutamaan haji mendorong umat Islam untuk berbondong-bondong memenuhi panggilan Allah tersebut. Hal ini bisa dilihat dari semakin banyaknya jumlah muslimin yang datang dari segala penjuru dunia di Tanah Suci pada bulan Zulhijjah.

Ibadah haji adalah rukun islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu baik secara lahiriah ataupun secara batiniah.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ^ط وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ط وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ^ط

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah SWT, yaitu (bagi) yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”⁸

Indonesia adalah merupakan Negara yang memiliki penduduk muslim yang banyak di dunia. Maka dari itu banyak sekali penduduk Indonesia yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji guna memenuhi kewajibannya sebagai umat islam. dari situlah karena semakin banyaknya orang ingin menunaikan haji.

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan tanggung jawab pemerintah dibawah kordinasi Menteri Agama, Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Menteri mengoordinasikannya

⁸ Ali Imran (3) : 97.

dan/atau bekerja sama dengan masyarakat, lembaga/instansi terkait, dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.⁹

Karena jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri. Serta dalam hal ini juga berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Di samping itu, Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat terbatas yang menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Di sisi lain adanya upaya untuk melakukan peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu dikelola secara profesional dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah haji dengan prinsip nirlaba.¹⁰

Sesuai dengan undang-undang penyelenggaraan haji no. 13 tahun 2008, bahwa peningkatan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah haji diupayakan melalui penyempurnaan sistem dan pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji. Pembinaan haji diwujudkan dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada masyarakat dan jemaah

⁹ undang-undang RI nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, pasal 8 ayat (2-3).

¹⁰ Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para penyelenggaranya. Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas dengan prinsip nirlaba” adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip tidak untuk mencari keuntungan, lihat: Undang undang RI Nomor 13 tahun 2008 Penyelenggaraan ibadah haji, pasal 2.

haji. Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi dan dokumen, transportasi, kesehatan, serta akomodasi dan konsumsi. Perlindungan diwujudkan dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan jemaah haji selama menunaikan ibadah haji.

Tujuan dari penyelenggaraan ibadah haji pada peraturan dan perundang-undangan adalah untuk mengelola kegiatan dalam bidang pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang baik kepada setiap jemaah haji.¹¹ Penyelenggaraan ibadah haji adalah suatu rangkaian yang dilakukan oleh pihak pemerintah setiap tahunnya. Pemerintah dalam hal tersebut ditangani langsung oleh pihak kementerian Agama. Maka setiap tahunnya diperlukan evaluasi untuk memperbaiki permasalahan yang ada.

Dalam realitanya banyak sekali persoalan yang perlu diselesaikan. Berbagai persoalan ini muncul karena kurangnya pengelolaan yang dilaksakan oleh pihak yang menangani, yaitu Kementerian Agama. Baik dalam pengelolaan masalah pendaftaran, bimbingan, ataupun persoalan ketika sudah berada di Arab Saudi. Dari masalah pendaftaran saja masih banyak yang perlu diselesaikan. Masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami bagaimana cara mendaftar haji yang sesuai prosedur pemerintah. Kebanyakan masyarakat awan khususnya yang berada di pedesaan/plosok-plosok yang jauh dari kota. Dipandang dari luas wilayah Kabupaten Cilacap yang terdiri dari 24 Kecamatan sangat besar kemungkinan masyarakat kurang memahami informasi tentang pelaksanaan Ibadah Haji. Mereka ketika mau mendaftarkan

¹¹ *Ibid.*, pasal 4.

calon haji lebih meminta bantuan/menitipkannya kepada kyai-kyai yang lebih memahami tentang prosedur pendaftaran haji. Tentunya dalam hal ini kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah akan hal tersebut. Dan tujuan dari pada pemerintah sendiri akan penyelenggaraan haji mandiri menjadi tidak/kurang berjalan kalau masyarakatnya dari segi pendaftaranpun tidak tahu.

Pelaksanaan pelayanan calon haji dari setiap tahunnya masih berjalan lamban baik dalam bidang administrasi maupun informasi, karena dalam pengelolaannya belum maksimal sistem jaringan komputerisasi terpadu (SISKOHAT) sehingga menghambat bagi masyarakat dalam menerima pelayanan informasi.

Kementerian Agama sebagai pelaksana ibadah haji setiap tahunnya dengan merujuk pada aturan dan mekanisme pelayanan, pembinaan dan perlindungan telah ditetapkan dalam undang undang, terkadang masih saja terdapat hambatan baik secara internal maupun eksternal.¹²

Pada penelitian ini penulis memiliki ketertarikan yang terkait dengan pengelolaan terhadap calon ibadah haji di suatu instansi yang berada dalam naungan Kementerian Agama, yaitu pada daerah Kabupaten Cilacap yang di dalamnya mengurus manajemen penyelenggaraan ibadah haji khususnya pada tahun 2009/2010. Kementerian Agama Kabupaten Cilacap ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia (SDM) tentang penyelenggaraan haji dalam lingkup kabupaten Cilacap. Penulis tertarik untuk

¹² Muhammad Solihin, *Implementasi Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Perencanaan di Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm 6.

melakukan penelitian disebabkan pada lembaga yang menangani masalah haji khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap tahun 2009/2010 perlu untuk dikaji terkait masalah manajemennya, guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi calon jemaah haji mendatang.

Apabila dipandang secara mendalam hal ini adalah permasalahan yang serius untuk ditanggapi bersama agar pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji bisa berjalan sesuai dengan apa yang ada dalam perundang undangan. Hal ini juga bisa jadi rujukan bersama untuk mengetahui letak kelemahan yang memang perlu diperbaiki. Sehingga dalam penelitian yang dilakukan penulis akan dapat memberikan sumbangsih terhadap realita yang terkait dengan manajemen penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap pada khususnya dan diseluruh Indonesia pada umumnya.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana manajemen penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap periode 2009/2010?

D. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Untuk menganalisis dan

mendeskripsikan proses manajemen penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap periode 2009/2010.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memperkaya wacana manajemen dalam dialektika kritis, sehingga memiliki pemahaman tentang manajemen yang substansial. Satu deskripsi tentang manajemen dalam wacana evaluasi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu manajemen.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi pengetahuan bagi Kementerian Agama Kabupaten Cilacap pada khususnya dan Kementerian Agama RI pada umumnya sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi pengelolaan ibadah haji agar lebih baik.

F. KAJIAN PUSTAKA

Pada dasarnya sudah ada penelitian terdahulu yang terkait dengan evaluasi pengelolaan ibadah haji dengan tema atau sudut pandang yang berbeda dari beberapa penelitian. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Solihin tahun 2005, Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang *Implementasi Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Perencanaan di Kantor Departemen Agama Kota*

Yogyakarta). Pada penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan atau penerapan manajemen pelaksanaan ibadah haji di kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta terkait dengan perencanaan penyelenggaraan ibadah haji.

Pada tahun 2003 Puslitbang Kehidupan Beragama mengadakan penelitian yang berjudul; *Pandangan Masyarakat Terhadap Pelayanan Ibadah Haji Oleh Pemerintah*. Pada penelitian ini menginformasikan bahwa menurut persepsi masyarakat pelayanan ibadah haji yang dilakukan oleh pemerintah sudah baik, namun secara rinci jika dilihat peraspek layanan (informasi, penyetoran, pendaftaran, pembimbingan, pemberian perangkat haji, pemondokan, transportasi, kesehatan, catering, dan layanan khusus) masih menunjukkan terdapatnya layanan yang kurang dalam beberapa aspek tertentu¹³.

Dari sumber pustaka di atas dapat kita simpulkan bahwa penelitian yang dilakukan tentang manajemen penyelenggaraan ibadah haji masih belum dan atau kurang dilakukan. Maka dari itu penulis lebih menitik beratkan pada Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap tahun 2009/2010.

¹³ Iman Syaukarni (Ed.), *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), hlm 5.

G. KERANGKA TEORI

1. Tinjauan Tentang Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Kata Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur.¹⁴

George R. Terry dalam bukunya yang berjudul "*Principles Of Manajemen*" memberikan definisi: "manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁵ Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah "managing" –pengelolaan-, sedangkan pelaksanaannya disebut manager atau pengelola.¹⁶ Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

¹⁴<http://elqorni.wordpress.com/2009/03/15/pengertian-manajemen-dan-fungsi-fungsinya-definition-and-functions-of-management/> diakses tanggal 28 Maret 2011.

¹⁵ <http://www.docstoc.com/docs/5676691/manajemen>, diakses pada tanggal 19 April 2011

¹⁶ G.R. Terry dan L.W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm 1.

Jadi manajemen dalam penelitian ini merupakan bagaimana lembaga bisa mengatur atau mengelola sesuatu dengan sistematis. Manajemen dalam penelitian ini adalah proses pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi pengelolaan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan ibadah haji yang tentunya dibawah/menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama Kabupaten Cilacap tahun 2009/ 2010.

b. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer/pengelola dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Dalam pembahasan fungsi manajemen sangat banyak teori-teori yang menyebutkan fungsi tersebut. Berbagai tokoh-tokoh banyak mengungkapkannya, tetapi dari berbagai fungsi tersebut penulis mengambil satu teori yang di ungkapkan oleh G.R Terry yang menyatakan fungsi manajemen yaitu: *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*.¹⁷ Adapun penjabaran dari fungsi tersebut sebagai berikut:

1) *Planning* (Perencanaan)

Planning/perencanaan dapat didefinisikan sebagai

“menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu

¹⁷<http://elqorni.wordpress.com/2009/03/15/pengertian-manajemen-dan-fungsi-fungsinya-definition-and-functions-of-management/> diakses tanggal 28 Maret 2011.

masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.¹⁸ Dalam melakukan suatu perencanaan harus dengan perumusan yang teliti dari berbagai kebijakan-kebijakan mengenai berbagai aspek serta kegiatan.

Perencanaan adalah fungsi organik manajemen yang pertama, karena tanpa perencanaan dan/atau rencana, maka tidak ada landasan berpijak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha mencapai tujuan; atau dengan kata lain merupakan dasar dan titik tolak dari kegiatan pelaksanaan selanjutnya.¹⁹

Penjabaran diatas merupakan hal yang paling ini ketika penulis mau melakukan penelitian. Artinya perencanaan ini yang nantinya menjadi dasar dalam menerapkan atau menjalankannya.

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian (*Organizing*) merupakan fungsi organik yang kedua. Definisi dari pada Pengorganisasian (*Organizing*) adalah mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.²⁰

Pengorganisasian menurut Prof. Dr. Mr.S. Prajudi terdiri atas tiga segi, yakni: penstrukturan (structuring), penstafan

¹⁸ G.R. Terry dan L.W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen,, hlm 9.

¹⁹ Susilo Maryoto, *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*, (Yogyakarta: BPFE, 1988), hlm 59-60.

²⁰ G.R. Terry dan L.W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen, hlm 9.

(staffing) yang merupakan penempatan orang-orang yang tepat untuk diberi tanggung jawab dan kewenangan, serta fungsionalisasi (functionalizing) yang menentukan dan merumuskan fungsi-fungsi dari setiap unit organisasi beserta tata hubungannya.²¹ Langkah-langkah yang diperlukan dalam pengorganisasian adalah pertama harus dengan sebaik-baiknya rencana yang telah ditetapkan, menegaskan siapa yang berwenang dan bertanggungjawab atas rencana yang telah dibuat, tujuan diperinci menjadi sub-sub/unit-unit, setiap unit kerja (unit tugas) dipertanggung jawabkan kepada suatu kelompok atau bagian/seksi dengan pimpinan pusat pada seorang kepala masing-masing, kepada kepala unit didelegasikan kewenangan serta tanggung jawab yang sesuai, pengaturan-pengaturan kemudian dibuat skema atau bagan organisasi.²²

Kegiatan-kegiatan yang harus cermati dalam

melaksanakan pengorganisasian adalah:²³

- a) Tetapkan dengan teliti dan tentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- b) Bagi-bagi pekerjaan menjadi tugas-tugas setiap orang.
- c) Tugas-tugas kelompok menjadi posisi-posisi
- d) Tentukan persyaratan-persyaratan setiap posisi.

²¹ Susilo Maryoto, Pengetahuan Dasar, hlm 95.

²² *Ibid*, hlm 94.

²³ G.R. Terry dan L.W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen, hlm 11.

- e) Kelompok-kelompok posisi menjadi satuan-satuan yang dapat dipilih dan saling berhubungan dengan baik.
- f) Bagi-bagikan pekerjaan pertanggungjawaban dan luas kekuasaan yang akan dilaksanakan.
- g) Ubah dan sesuaikan organisasi sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan kondisi-kondisi yang berubah-ubah.
- h) Berhubungan selalu selama proses pengorganisasian.

3) *Actuating* (Penggerakan)

Fungsi manajemen yang ada, perencanaan dan pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang sangat utama dan fundamental. Realisasi dari kedua fungsi itulah maka fungsi manajemen yang lain, yakni Penggerakan (*Actuating*) dan pengawasan (*Controlling*) diperlukan. Penggerakan merupakan bagian yang vital juga dalam proses manajemen, karena berhubungan langsung dengan orang-orang yang menggerakkan organisasi yang bersangkutan. Sementara “manajemen” menganggap bahwa “*actuating*” tersebut merupakan esensi daripada manajemen, karena dari situlah timbulnya kekuatan, antusiasme, dan kemauan dari orang-orang dalam organisasi untuk melakukan tugasnya agar mencapai tujuan.²⁴

²⁴ Susilo Maryoto, Pengetahuan Dasar, hlm 115.

Definisi daripada penggerakan (*actuating*) sendiri adalah segala tindakan untuk menggerakan orang-orang dalam suatu organisasi, agar dengan kemauan penuh berusaha mencapai tujuan organisasi dengan berlandaskan pada perencanaan dan pengorganisasian yang telah ada.²⁵ Dari definisi tersebut jelaslah betapa pentingnya fungsi manajemen ini, karena disinilah antara letak sukses dan tindakan suatu organisasi itu.

4) *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan (*Controlling*) merupakan fungsi organik yang keempat dan terakhir daripada manajemen. George R. Terry Ph.D berpendapat bahwa bila ketiga fungsi organik manajemen telah dilaksanakan dengan baik, maka hanya sedikit saja yang diperlukan dalam pengawasan. Tetapi sebaliknya bahwa dalam kenyataannya tidak pernah dari ketiga fungsi manajemen dilakukan secara 100% efektif. Dari situ maka pengawasan sangat diperlukan agar tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya benar-benar dapat dicapai secara efisien dan efektif.

Dengan pengawasan (*Controlling*) dimaksudnya suatu proses untuk menentukan apa yang harus dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, menilai proses dan hasil pelaksanaan

²⁵ *Ibid*, hlm 116.

pekerjaan/tugas, melakukan koreksi-koreksi atas kesalahan-kesalahan agar sesuai rencana dan sebagainya.²⁶

Melalui proses pengawasan ini nantinya akan tau sejauh mana proses manajemen penyelenggaraan ibadah haji berjalan, apakah sudah maksimal artinya sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang sudah dibuat sebelumnya ataukah masih kurang terutama manajemennya. Fungsi controlling ini menjadi penting ketika dalam pengawasan sesuai dengan prosedur, para pengawas bekerja secara professional.

Dalam penelitian ini terkait dengan manajemen penyelenggaraan ibadah haji di kementerian agama kabupaten cilacap tahun 2009/2010 akan kita lihat bagaimana pengawasan yang sudah dilakukan oleh pihak lembaga tersebut. Jika controlling ini berjalan dengan baik tentunya bisa mengurangi permasalahan penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam pemaparan diatas tentang penjelasan poin-poin fungsi manajemen, tentunya sudah bisa kita pahami. Semua fungsi manajemen mantinya yang dijadikan alat dalam menganalisis sesuatu. Dalam hal ini tentu pada penyelenggaraan ibadah haji.

²⁶ *Ibid*, hlm 123-124.

2. Tinjauan Umum Tentang Haji

a. Pengertian Haji

Haji (Bahasa Arab: حج, *Haji*) adalah rukun (tiang agama) Islam yang kelima setelah syahadat, salat, zakat dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum Muslim sedunia yang mampu (material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai *musim haji*.²⁷ Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu.²⁸

Kegiatan dalam melaksanakan ibadah haji pada intinya adalah dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah ketika umat Islam bermalam di Mina, wukuf (berdiam diri) di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, dan berakhir setelah melempar jumrah (melempar batu simbolisasi setan) pada tanggal 10 Dzulhijjah. Masyarakat Indonesia lazim juga menyebut hari raya Idul Adha sebagai Hari Raya Haji karena bersamaan dengan perayaan ibadah haji ini.

b. Penyelenggaraan Ibadah Haji

Dilihat dari banyaknya umat islam yang ada di Indonesia, dan haji adalah hal yang wajib dilakukan bagi setiap umat islam yang

²⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Haji>, diakses pada tanggal 1 Maret 2011.

²⁸ Ibadah haji dilakukan pada bulan Dzulhijjah, kalau ibadah yang dilakukan pada waktu kapan saja dinamakan umrah.

mampu, maka setiap tahunnya masyarakat berbondong-bondong untuk menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia sudah dilakukan oleh masyarakat sejak jaman penjajahan Belanda.

Pada zaman penjajahan penyelenggaraan ibadah haji belum terorganisir seperti halnya sekarang. Dahulu orang ingin menunaikan ibadah haji bisa memakan waktu berbulan-bulan untuk sampai ke Arab Saudi. Mereka berangkat dengan menggunakan kapal tumpangan-tumpangan yang hendak pergi ke Negara lain. Namun semenjak setelah kemerdekaan selang beberapa tahun haji sudah menjadi urusan pemerintah. Karena banyaknya umat islam yang berhaji maka pemerintah yang dikordinatori oleh Kementerian Agama mengelola haji dengan sebaik mungkin, agar masyarakat Indonesia tidak kebingungan.

Pemerintah dalam mengurus penyelenggaraan ibadah haji menetapkan berbagai prosedur-prosedur/peraturan-peraturan bagi masyarakat yang ingin menunaikan haji agar bisa terorganisir dengan baik. Berangkat dari situlah maka pemerintah dituntut untuk mengurus penyelenggaraan ibadah haji dengan baik. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran

agama Islam.²⁹ Pembinaan haji diwujudkan dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada masyarakat dan jemaah haji. Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi dan dokumen, transportasi, kesehatan, serta akomodasi dan konsumsi. Perlindungan diwujudkan dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan jemaah haji selama menunaikan ibadah haji. Dan diperjelas lagi dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2009 bahwa Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi:³⁰

- 1) pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
- 2) pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
- 3) perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;
- 4) penggunaan paspor biasa dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; dan
- 5) pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.

²⁹ Undang undang RI Nomor 13 tahun 2008 Penyelenggaraan Ibadah Haji, pasal 3.

³⁰ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009, *Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, pasal 7.

Dari pemaparan tersebut maka hal yang harus diperhatikan dan harus dipersiapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pihak Kementerian Agama sangat banyak. Karena banyaknya yang harus dikerjakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan haji, maka dari tahun ketahun penyelenggaraan haji selalu terdapat masalah.

Pemaparan di atas yang menjadi alasan penulis untuk mendalami lebih jauh terkait dengan manajemen penyelenggaraan ibadah haji tentunya yang menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan ibadah haji yaitu pelayanan, pembinaan dan perlindungan jamaah haji. Dalam penelitian ini tentunya dari tiga prinsip tersebut harus dipenuhi. Penjabaran dari pada tiga (3) prinsip haji yaitu pelayanan, pembinaan, dan perlindungan adalah:

- 1) Pemberian layanan administrasi dan dokumen
- 2) Pemberian layanan kesehatan
- 3) Kenyamanan Transportasi
- 4) Bimbingan manasik haji/materi lainnya
- 5) Jaminan keamanan dan perlindungan

Dari uraian tersebut tentunya kesemuanya itu yang terkait dan diurus langsung oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, diluar itu semua penulis tidak melakukannya. Hal yang terkait dan menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama Kabupaten Cilacap tentunya dari mulai urusan calon jamaah haji mendaftar

sampai urusan diberangkatkan ke embarkasi Solo untuk diberangkatkan melalui bandara Adi Sumarmo dan proses pemulangan jamaah haji dari debarkasi solo sampai ke Cilacap.

Beberapa yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan haji adalah pedoman perundang-undangan/praturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah serta petunjuk teknis perencanaan haji tahun 2009/2010. Kesemuanya ini nantinya yang menjadi inti ketika penulis melakukan penelitian.

H. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah merupakan cara yang utama untuk digunakan dalam penelitian guna mencapai satu tujuan penelitian, yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis guna memperoleh data tertentu yang diperlukan dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.³¹ Penelitian ini juga sering

³¹ Ronny Kountur, *Metode Penelitian: Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Buana Printing, 2009), hlm 108.

disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini penulis tidak melakukan control dan memanipulasi variable penelitian.³²

Penelitian dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif ini dapat diartikan metode penelitian yang menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada keadaan nyata seperti data yang ada di lapangan. Penelitian deskriptif pada dasarnya berusaha membuat penggambaran tentang manajemen penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap tahun 2009/ 2010.

2. Kebutuhan Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer adalah jenis data utama yang digunakan oleh penulis guna mencapai tujuan penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah dokumen hasil kerja pengelolaan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, perundang-undangan tentang perhajian Indonesia dan petunjuk teknis perencanaan haji tahun 2009/2010 yang digunakan sebagai landasan.

. Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pelengkap dalam analisis penelitian. Yang termasuk dalam data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa keterangan-keterangan langsung dari pihak yang terkait dengan pengelolaan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, buku-buku pendukung, dll.

³² Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 157.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian manajemen penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap tahun 2009/ 2010 ini, tentunya merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan manajemen. Pada penelitian ini digunakan konsep pendekatan manajemen, pendekatan manajemen adalah pengelolaan secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan³³. Digunakan pendekatan manajemen dalam penelitian yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap tahun 2009/2010 terkait manajemen penyelenggaraan Ibadah haji yang diselenggarakan setiap tahunnya, yang terkait dengan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan pada tahun 2009/2010. Manajemen disini adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yaitu proses diperolehnya data dari sumber data.³⁴

a. Observasi

Observasi adalah salah satu cara untuk memperoleh data primer.³⁵ Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah

³³ M. Safaat Habib, *Buku Pedoman Dakwah*, hlm 194.

³⁴ Wibowo Arto, *Pilihan Bahasa Pedagang Etnis Cina Dalam Interaksi Jual Beli di Pasar Kota Salatiga*, Skripsi tidak diterbitkan (Semarang: UNNES, 2006), hlm 30.

³⁵ Ronny Kountur, *Metode Penelitian*, hlm 184.

melakukan pengamatan terkait dalam kegiatan yang berlangsung di kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap tanpa peran serta penulis di dalamnya hanya mengamati dan mencatat kegiatan yang terkait dengan proses pengelolaan ibadah haji.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen sebagai laporan tertulis dari peristiwa-peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan-penjelasan dan pemikiran-pemikiran, peristiwa itu ditulis dengan kesadaran dan kesengajaan untuk menyiapkan atau meneruskan keterangan-keterangan peristiwa,³⁶ dan bila perlu dilengkapi dengan lampiran foto-foto dokumentasi penelitian. Metode dokumen ini adalah cara mengumpulkan data melalui tulisan, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku yang dapat mendukung terhadap permasalahan dalam penelitian. Dokumen tertulis yang digunakan sebagai sumber penelitian merupakan arsip-arsip yang dimiliki oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, yang meliputi profil lembaga, sejarah perkembangan pelaksanaan kegiatan ibadah haji yang termasuk juga buku-buku tentang teori, pendapat, serta dalil-dalil/ hukum-hukum dan lain-lain yang mendukung penelitian ini.

³⁶ Lexy J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1994), hlm 135-136.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.³⁷ Ada beberapa jenis wawancara, diantaranya adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.³⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur atau yang lebih dikenal dengan istilah wawancara tidak resmi (*informal interview*). Proses wawancara yang terjadi disini adalah antara si pewawancara dengan yang diwawancarai berbicara dengan santai tanpa adanya daftar pertanyaan yang resmi.

Dalam wawancara ini yang terkait dengan manajemen penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap tahun 2009/2010 target atau sasaran yang diwawancarai adalah petugas dari Kementerian Agama Kabupaten Cilacap serta Jamaah haji tahun 2009/2010.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi, artinya seluruh data yang sudah terkumpul diolah secara non-statistik untuk menggambarkan situasi hasil penelitian.

Analisis data dimulai sejak pengumpulan data berlangsung melalui metode di atas, dimana setiap data yang diperoleh akan terlebih dahulu di seleksi agar data yang diolah lebih akurat dan objektif. Selanjutnya data

³⁷ Lexy J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2009), hlm 186.

³⁸ Ronny Kountur, *Metode Penelitian*, hlm 186.

yang diperoleh dianalisis dengan penyaringan data, pengolahan dan penyimpulan. Data kemudian disusun dalam katagori-katagori yang saling dihubungkan dari berbagai sumber. Melalui proses inilah penyimpulan yang dibuat dengan tujuan untuk memperkokoh dan memperluas bukti yang dijadikan landasan. Pengujian yang dilakukan terhadap interpretasi bab-bab sebelumnya dalam suatu kerangka uraian logis dan kausalistik untuk memperkokoh bukti penguat kesimpulan dan beberapa sumber.

Dengan kata lain, analisis data dilakukan dengan mengenakan dua metode yaitu triangulasi dan interpretasi. Metode triangulasi pada dasarnya berpijak pada validitas temuan-temuan dan tingkat tingginya pemakaian lebih dari satu teknik pengumpulan data. Menurut Moleong (2004), teknik ini merupakan pemeriksa kesalahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.³⁹

Sedangkan analisis interpretatif adalah teknik untuk mendapatkan makna serta analisis terhadap objek-objek, peristiwa serta tindakan aktor, metode ini berusaha mencari makna secara luas dan mendalam atas tindakan sosial.

³⁹ Lexy J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hlm 178.

6. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, panitia pelaksana haji tahun 2009/2010 dan jamaah haji tahun 2010 yang merupakan pelaku haji. Objek penelitian ini adalah Pengelolaan Ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap tahun 2009/ 2010.

I. SISTEMATIKA PENELITIAN

Penelitian skripsi ini di mulai dengan Bab pendahuluan yang berisi penegasan judul sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul ini. selanjutnya dibahas tentang latar belakang mengapa penulis mengangkat judul ini sebagai bahan penelitian, diteruskan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan telaah pustaka. Setelah itu disajikan pula kerangka teoritik yang akan dijadikan sebagai pertimbangan dalam menganalisa hasil penelitian yang didapatkan, penyajian metode penelitian dan sistematika penelitian skripsi ini.

Sedangkan pada Bab II berisi tentang latar belakang dan sejarah berdirinya Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, struktur organisasi, visi-misi , program kerja dan lain-lain sebagainya dari lembaga Kementerian Agama Kabupaten Cilacap.

Adapun pada Bab III berisikan tentang manajemen penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap tahun 2009/2010. Pelayanan, Pembinaan serta perlindungan. Poin pertama tinjauan tentang

manajemen penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Cilacap. Poin kedua tentang manajemen penyelenggaraan ibadah haji di kementerian agama kabupaten cilacap tahun 2009/2010.

Bab IV merupakan Bab terakhir dalam penelitian skripsi, isi Bab ini adalah kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Setelah penguraian hal-hal tersebut maka selesailah penelitian skripsi.



Penetapan tujuan merupakan usaha untuk menciptakan nilai-nilai tertentu melalui berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh lembaga, penetapan tujuan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya biaya, fasilitas, lingkungan masyarakat, potensi personalia yang tersedia dalam lembaga, dll.

Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kab. Cilacap dalam melakukan kegiatan proses pembentukan program kerja tentunya dilakukan setiap tahun sekali. Perumusan program ini mengacu kepada program kerja Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2010-2014. Dan juga rujukan pembuatan program kerja mengacu kepada hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya yaitu tahun 2009.

2. Pengorganisasian (*Organizing*) Haji

Pengorganisasian digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam rangka kerjasama untuk meraih sebuah tujuan yang disepakati bersama dan dapat mempermudah dalam pelaksanaan rencana kerja. Sebuah organisasi pasti mempunyai kepengurus. Karena kepengurusan ini adalah sangat penting karena untuk pelaksana kegiatan. Dalam menjalankan kegiatan itu perlu *team work* guna mencapai tujuan yang diinginkan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan penyelenggaraan haji dikoordinir langsung oleh Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah.

Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Seksi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam sebuah pengorganisasian adalah sebagai berikut:

- a. Merinci pekerjaan atau memperjelas tugas-tugas yang akan dilakukan
- b. Membagi tugas-tugas kepada para anggota.

Penyatuan pekerjaan dan pengelompokkan tugas yang saling berkaitan, menetapkan mekanisme kerja dan kesesuaian antara bidang pekerjaan dan keahlian.

3. Penggerakan (*Actuating*) Haji

Penggerakan bermaksud meminta para pelaksana untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji. Penggerakan petugas yang dilakukan oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

- a. Penggerakan dalam internal kantor
 - 1) Memberikan kepercayaan kepada para petugas untuk menjalankan tugasnya masing-masing
 - 2) Pimpinan memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk menyampaikan pendapat, koreksi, dalam pengajuan pertanyaan.

- 3) Memberikan semangat yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya
 - 4) Memberikan kesempatan pada para petugas/staf yang belum pernah ikut/masih kurang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan bidang haji.
 - 5) Memberikan pengarahan kepada para staf-stafnya dalam melaksanakan tugasnya
- b. Penggerakan dalam lingkungan eksternal
- 1) Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan bidang haji
 - 2) Pengarahan dan pemahaman kepada calon jamaah haji
 - 3) Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada calon jamaah haji.

c. Pengawasan (*Controlling*) Haji

Dalam proses untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada jamaah haji pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam hal ini Kepala Kantor dan Kepala Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji terus memonitoring terhadap kinerja para petugas haji di tingkat daerah kabupaten Cilacap. Selain itu juga dalam lembaga islam dan KBIH juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan tentang kinerja para petugas haji.

Proses pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam usaha untuk mengetahui hasil dan mengadakan perbaikan terhadap proses penyelenggaraan Ibadah haji. Hal ini dilaksanakan dengan mengadakan dialog langsung setelah penyelenggaraan ibadah haji untuk mengetahui beberapa kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam menjalankan proses manajemen penyelenggaraan ibadah haji. pelaksanaan evaluasi ini menghadirkan beberapa pihak yang bersangkutan antara lain: (a) panitia pelaksana dan Seksi Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, (b) jamaah haji di Kabupaten Cilacap, (c) KBIH-KBIH di Kabupaten Cilacap serta pihak-pihak lainnya.

B. SARAN-SARAN

Hal yang perlu penulis sarankan dari hasil penelitian selama ini adalah terdapat beberapa fakta yang harus diperhatikan bersama, diantaranya:

1. Perlunya untuk terus mempertahankan dan terus mengembangkan kualitas yang sudah ada dalam bidang penyelenggaraan ibadah haji.
2. Memberikan pelatihan-pelatihan yang mendukung dalam peningkatan manajemen penyelenggaraan haji
3. Perlunya menambah staf agar bisa lebih ringan dalam melaksanakan kegiatan rutin haji dengan baik.

4. Perlunya memberikan keterbukaan publik agar dapat diakses oleh semua kalangan.
5. Perlunya media online yang harus dimiliki oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap
6. Perlunya pengembangan dalam profil kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap baik dari sejarah maupun struktur yang jelas dan dibukukan
7. Memberikan keterbukaan yang lebih agar para masyarakat baik kalangan pengembang riset/para peneliti dapat masuk dan tertarik untuk mengadakan riset agar dapat meningkatkan manajemen yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap khususnya dan pada wilayah Cilacap pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perhajian II*. Jakarta: Direktorat jenderal bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2001.
- _____, *Fiqih haji*, Jakarta: Direktorat jenderal bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2001.
- _____, *Modul I (Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jakarta: Direktorat jenderal bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2008.
- _____, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: Direktorat jenderal penyelenggaraan haji dan umrah, 2008.
- _____, *petunjuk teknis penyelesaian paspor bagi jamaah haji*, (Jakarta: Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah, 2009.
- G.R. Terry dan L.W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- <http://www.docstoc.com/docs/5676691/manajemen>
- <http://elqorni.wordpress.com/2009/03/15/pengertian-manajemen-dan-fungsi-fungsinya-definition-and-functions-of-management/>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Haji>
- <http://opini.wordpress.com/tag/haji/>
- Iman Syaukarni (Ed.), *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Kegamaan, 2009.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, *Pelaksana Tugas Tahun 2010 Rencana Program Kerja Tahun 2011 Seksi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah*, Cilacap: tidak diterbitkan, 2010.
- Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, *Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2010*, Cilacap: Tidak diterbitkan, 2010.
- Keputusan Dirjen BIPH nomor 163 Tahun 2004 *Tentang Sistem Pendaftaran Haji Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji*.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 tahun 2002 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 442/MENKES/SK/VI/2009, *Tantang Pendoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia*.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 396 Tahun 2003, *Tentang Perubahan Keputusan Menteri Agama Ri Nomor 371 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2010, *Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2010-2014*.

Lexy J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1994.

_____, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2004.

_____, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2009.

Muhammad Solihin, *Implementasi Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Perencanaan di Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta)*, Skripsi, Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: (Tidak diterbitkan), 2005.

M. Safaat Habib, *Buku Pedoman Dakwah*, Jakarta: Wijaya, 1982.

Nogarsyah Moede Gayo, *Pustaka pintar haji dan umrah*, Jakarta: Inovasi, 2003.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009, *tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*.

Pius A Partanto & M. Dahlan Al Barry, *Kamus ilmiah populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Ronny Kountur, *Metode Penelitian (Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis)* Jakarta: Buana Printing, 2009.

Suad Husnah, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1989.

Sundarmi Burkan Saleh, *Pedoman haji, umrah, dan ziarah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Susilo Maryoto.SE., *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*, Yogyakarta: BPFE, 1988.

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 *Tentang Penyelenggaraan ibadah haji.*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tenang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Menjadi Undang-Undang.*

Wibowo, Arto, *Pilihan Bahasa Pedagang Etnis Cina Dalam Interaksi Jual Beli di Pasar Kota Salatiga, Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia UNNES Semarang: (tidak diterbitkan), 2006.*